

**Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Kepulauan Bangka Belitung
Catatan Atas Laporan Keuangan**

Untuk Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022
Berakhir 31 Desember 2022

**Ditjen Pemasyarakatan
(05) UAPPA-W
AUDITED**

Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam-Pangkalpinang
Telp. (0717) 439435-439439. Fax (0717)439435

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (05) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Ditjen Pemasyarakatan) Tahunan Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Ditjen Pemasyarakatan). Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 2 Mei 2023
Kepala Kantor Wilayah

HARUN SYLianto
NIP. 196504081987031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan.....	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum.....	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	33
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	37
F. Pengungkapan Penting Lainnya	40

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DITJEN PEMASYARAKATAN (05)**

Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Air Itam-Pangkalpinang
Telp. (0717) 439435-439439. Fax (0717) 439435

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kep. Bangka Belitung (DITJEN PEMASYARAKATAN) tingkat wilayah selaku UAPPA-
W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan
Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan
Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan
tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing
Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Pangkalpinang, 2 Mei 2023
Kepala Kantor Wilayah



HARUN SYLIANTO
NIP. 196504081987031002

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Tahunan Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp189.628.574** atau mencapai 985 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp19.248.000**.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp74.128.447.881** atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp74.934.686.000**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar **Rp236.833.287.538** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp2.090.968.018**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp234.740.319.520**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp2.000.000**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp149.906.962** dan **Rp236.683.380.576**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp176.686.359**, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp72.346.649.616** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp(72.169.963.257)**. Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar

Rp(1.438.345.420) dan **Rp0** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp(73.608.308.677)**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar **Rp228.908.656.447** ditambah Defisit-LO sebesar **Rp(73.608.308.677)** kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai **Rp(2.062.000)** dan Transaksi Antar Entitas senilai **Rp81.385.094.806**, serta penurunan ekuitas senilai **Rp7.774.724.129** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp236.683.380.576**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
(DITJEN PEMASYARAKATAN)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	PER 31 DESEMBER 2022		% THD ANGGARAN	REALISASI PER 31 DES 2021
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	19.248.000	189.628.574	985,19	194.471.209
JUMLAH PENDAPATAN		19.248.000	189.628.574	985,19	194.471.209
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	30.494.452.000	30.460.622.985	99,89	29.036.472.886
Belanja Barang	B.2.2	35.313.214.000	34.557.444.047	97,86	31.651.547.230
Belanja Modal	B.2.3	9.127.020.000	9.110.380.849	99,82	169.370.000
JUMLAH BELANJA		74.934.686.000	74.128.447.881	98,92	60.857.390.116

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
(DITJEN PEMASYARAKATAN)
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	2.090.968.018	1.294.772.292
Jumlah Aset Lancar		2.090.968.018	1.294.772.292
ASET TETAP			
Tanah	C.2	161.857.920.000	161.507.895.000
Peralatan dan Mesin	C.3	36.553.455.219	31.006.864.286
Gedung dan Bangunan	C.4	80.127.821.791	71.309.710.071
Aset Tetap Lainnya	C.5	45.143.245	45.143.245
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.6	(43.844.020.735)	(37.717.121.125)
Jumlah Aset Tetap		234.740.319.520	226.152.491.477
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.7	458.061.736	2.882.110.632
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.8	(456.061.736)	(1.396.278.748)
Jumlah Aset Lainnya		2.000.000	1.485.831.884
JUMLAH ASET		236.833.287.538	228.933.095.653
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.9	149.290.178	22.210.500
Pendapatan Diterima Dimuka	C.10	616.784	2.228.706
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		149.906.962	24.439.206
JUMLAH KEWAJIBAN		149.906.962	24.439.206
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	236.683.380.576	228.908.656.447
JUMLAH EKUITAS		236.683.380.576	228.908.656.447
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		236.833.287.538	228.933.095.653

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
(DITJEN PEMASYARAKATAN)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	176.686.359	140.475.116
JUMLAH PENDAPATAN		176.686.359	140.475.116
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	30.460.622.985	29.025.271.886
Beban Persediaan	D.3	3.321.735.612	2.670.695.401
Beban Barang dan Jasa	D.4	27.233.945.473	25.062.966.994
Beban Pemeliharaan	D.5	3.093.562.296	2.872.222.749
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.412.884.123	1.581.110.200
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	5.823.899.127	5.336.349.892
JUMLAH BEBAN		72.346.649.616	66.548.617.122
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(72.169.963.257)	(66.408.142.006)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(1.438.345.420)	(47.781.646)
-Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		14.554.137	
-Beban Pelepasan Aset Non Lancar		1.452.899.557	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	50.064.968
-Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	50.064.968
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D8	(1.438.345.420)	2.283.322
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(73.608.308.677)	(66.405.858.684)
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(73.608.308.677)	(66.405.858.684)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
(DITJEN PEMASYARAKATAN)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	228.908.656.447	231.600.372.724
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(73.608.308.677)	(66.405.858.684)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS		(2.062.000)	(5.069.614.086)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		-	(2.263.703.269)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	41.189.355
SELISIH REVALUASI ASET		-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3	(2.062.000)	(2.848.802.591)
KOREKSI LAIN-LAIN		-	1.702.419
JUMLAH		155.298.285.770	160.124.899.954
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	81.385.094.806	68.783.756.493
EKUITAS AKHIR	E.5	236.683.380.576	228.908.656.447

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Entitas berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Jalan Pulau Bangka Air Itam, Kota Pangkajene, Kepulauan Bangka Belitung.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Ditjen Pemasarakatan) berkomitmen dengan visi ***“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa misi sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian,
4. Administrasi Hukum Umum dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi,
5. Bermartabat dan Terpercaya;
6. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
7. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;

8. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakat;
9. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Adapun Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yaitu "PASTI" :

1. Profesional;
2. Akuntabel;
3. Sinergi;
4. Transparan;
5. Inovatif.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahunan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung adalah 10 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No.	Kode Eselon I	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker
1	05	3000	649003	Kantor Wilayah Divisi Pemasarakatan
2	05	3000	406508	Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
3	05	3000	683682	Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang
4	05	3000	352605	LPKA Kelas II Pangkalpinang
5	05	3000	568712	Lapas Kelas IIB Sungailiat
6	05	3000	406514	Lapas Kelas IIB Tanjungpandan
7	05	3000	418347	Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang
8	05	3000	406523	Rutan Kelas IIB Muntok
9	05	3000	663090	Rupbasan Pangkalpinang
10	05	3000	653222	BAPAS Kelas II Pangkalpinang

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk

memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan - LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan - LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - 2) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - 3) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 3) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- 6) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

- a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- 1) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- 2) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 3) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 5) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas

yang dibatasi penggunaannya.

- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 4) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai berikut :

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (DITJEN PEMASYARAKATAN) melakukan beberapa kali revisi DIPA. Revisi yang dilakukan membuat perubahan pagu anggaran disebabkan adanya kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan, khususnya terkait dengan pagu minus Belanja Pegawai yang tidak dapat ditutup dengan revisi anggaran menggunakan mekanisme revisi antar satker dalam lingkup satu wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

URAIAN	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
PNBP	19.248.000	19.248.000
Jumlah Pendapatan	19.248.000	19.248.000
Belanja	-	
Belanja Pegawai	27.308.812.000	30.494.452.000
Belanja Barang	37.785.833.000	35.313.214.000
Belanja Modal	9.325.000.000	9.127.020.000
Jumlah Belanja	74.419.645.000	74.934.686.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp189.628.574*

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp189.628.574** atau mencapai **985 persen** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp19.248.000**. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep.Bangka Belitung berasal dari:

1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya;
2. Pendapatan Sewa tanah, Gedung, dan Bangunan;
3. Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya; dan
4. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.

**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2022**

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	14.554.137	#DIV/0!
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19.248.000	47.721.713	247,93
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	-	82.908.000	#DIV/0!
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	44.444.724	#DIV/0!
Jumlah	19.248.000	189.628.574	985,19

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 2,49 persen dibandingkan realisasi pendapatan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**Perbandingan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

URAIAN	PER 31 DES 2022	PER 31 DES2021	NAIK (TURUN) %
PNBP	189.628.574	194.471.209	-2,49
Jumlah	189.628.574	194.471.209	-2,49

**Realisasi
Belanja Negara
Rp74.128.447.881**

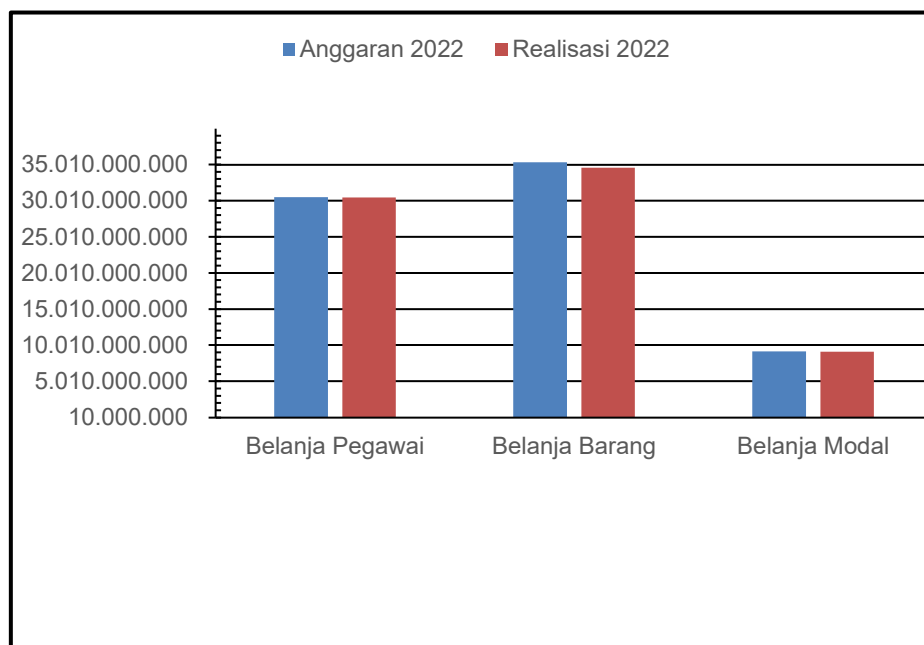
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp74.128.447.881** atau 99 persen dari anggaran belanja sebesar **Rp74.934.686.000**. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 tersaji sebagai berikut:

**Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2022**

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	30.494.452.000	30.464.420.362	99,90
Belanja Barang	35.313.214.000	34.581.694.054	97,93
Belanja Modal	9.127.020.000	9.110.380.849	99,82
Total Belanja Kotor	74.934.686.000	74.156.495.265	98,96
Pengembalian Belanja	-	28.047.384	#DIV/0!
Total Belanja	74.934.686.000	74.128.447.881	98,92

Komposisi anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2022 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 21,81 persen dibandingkan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2021. Hal ini disebabkan antara lain :

Adanya kenaikan grade pegawai disebabkan inpassing pegawai di lingkungan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dari JFU ke JFT, dan adanya pegawai baru CPNS Tahun 2020. Selain itu kenaikan juga disebabkan karena belanja modal untuk pembangunan Gedung Kantor Balai Pemasarakatan Tanjungpandan.

***Perbandingan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2022 dan 2021***

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	30.460.622.985	29.036.472.886	4,90
Belanja Barang	34.557.444.047	31.651.547.230	9,18
Belanja Modal	9.110.380.849	169.370.000	5.278,98
Jumlah	74.128.447.881	60.857.390.116	21,81

**Belanja
Pegawai
Rp30.460.622.985**

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp30.460.622.985** dan **Rp29.036.472.886**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021, realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 5 persen dari realisasi belanja yang berakhir pada 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan antara lain adanya pembayaran gaji bulan ketiga belas Tahun Anggaran 2022, dan kenaikan grade pegawai disebabkan inpassing pegawai di lingkungan pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dari JFU ke JFT, serta adanya pegawai baru CPNS.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	PER 31 DES 2022	PER 31 DES 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	30.225.720.362	28.895.454.553	5
Belanja Lembur	238.700.000	147.866.050	61
Jumlah Belanja Kotor	30.464.420.362	29.043.320.603	5
Pengembalian Belanja Pegawai	3.797.377	6.847.717	- 45
Jumlah Belanja	30.460.622.985	29.036.472.886	5

**Belanja
Barang
Rp34.557.444.047**

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp34.557.444.047** dan **Rp31.651.547.230**. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan 9,18 persen dari Realisasi Belanja Barang untuk periode 31 Desember 2021.

Hal tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan realisasi belanja perjalanan dalam negeri karena kelonggaran ketentuan perjalanan dalam negeri pada masa pandemi Virus Covid-19.

***Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2022 dan 2021***

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2022	Realisasi Per 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	20.910.069.393	20.990.145.671	(0,38)
Belanja Barang Non Operasional	4.619.444.933	2.908.204.897	58,84
Belanja Barang Persediaan	2.314.791.858	2.015.425.057	14,85
Belanja Jasa	1.577.271.469	1.472.055.375	7,15
Belanja Pemeliharaan	2.724.982.271	2.684.606.030	1,50
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.410.884.123	1.581.110.200	52,48
Jumlah Belanja	34.557.444.047	31.651.547.230	9,18

Berkaitan dengan alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, Satker pada Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Divisi Pemasyarakatan) mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar **Rp287.362.000**. Anggaran tersebut terserap sebesar **Rp271.359.090** dengan rincian sebagai berikut:

***Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19
Tahun Anggaran 2022***

AKUN	URAIAN AKUN	PAGU	REALISASI	PENYERAPAN (%)	JENIS BARANG
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	Rp 6.300.000	Rp 6.300.000	100,00	
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	Rp 277.186.000	Rp 263.589.090	95,09	Masker, Handsanitizer, Sabun Cuci Tangan
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 3.876.000	Rp 1.470.000	37,93	Jasa Swab PCR dan Antigen
	JUMLAH	Rp 287.362.000	Rp 271.359.090	94,43	

***Belanja Modal
Rp9.110.380.849***

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp9.110.380.849** dan **Rp169.370.000**. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 5.279 persen dari Realisasi Belanja Modal untuk periode 31 Desember 2021. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya belanja modal Gedung

dan bangunan untuk pembangunan Gedung Kantor Balai Pemasyarakatan Tanjungpandan pada Tahun Anggaran 2022.

***Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2022 dan 2021***

AKUN	URAIAN AKUN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK/ (TURUN) %
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 743.422.349	Rp 169.370.000	339
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 8.366.958.500	Rp -	#DIV/0!
JUMLAH		Rp 9.110.380.849	Rp 169.370.000	5.279

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan
Rp2.090.968.018

C.1. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp2.090.968.018** sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp1.294.772.292**. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam masa pandemi Covid-19, barang atau perlengkapan tersebut juga digunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 2021

Persediaan	TA 2022	TA 2021
Barang Konsumsi	1.423.601.483	913.120.757
Amunisi	450.426.535	361.926.535
Bahan Untuk Pemeliharaan	216.940.000	19.725.000
Jumlah	2.090.968.018	1.294.772.292

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Berkaitan dengan Persediaan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, terdapat Persediaan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 yang dibeli sendiri. Persediaan tersebut dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2022. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 :

Rincian Persediaan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Per 31 Desember 2022

No.	Nama Satker	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1	BAPAS Pangkalpinang	Masker Medis	1 Pack	Rp 37.000
2	Lapas Kelas IIB Tanjungpandan	Rapid Test	5 Pack	Rp 6.601.560
		Face Shield	58 pcs	Rp 1.177.400
3	Rupbasan Pangkalpinang	Hand Sanitizer.	12 Liter	Rp 660.000
		Face Shield	30 Buah	Rp 270.000
		Masker	24 Box	Rp 1.440.000
		Sarung Tangan (Hand Gloves)	1 Box	Rp 39.000
		Sabun Cuci Tangan	15 Buah	Rp 900.000
JUMLAH				11.124.960

Tanah
Rp161.857.920.000

C.2. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp161.857.920.000**, sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp161.507.895.000**. Mutasi nilai tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

TANAH	
Saldo Awal	161.507.895.000
Mutasi Tambah	350.025.000
Mutasi Kurang	-
Saldo Per 31 Desember 2021	161.857.920.000

Mutasi tambah tanah pada Tahun Anggaran 2022 berupa hibah tanah seluas 23.335 m² dengan nilai sebesar Rp350.025.000 yang diterima oleh satker Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang pada tahun 2022 dari Pemerintah Kota Pangkalpinang, dengan rincian data hibah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Barang	No. MOU/BAST	No. Register Hibah	No. MPHLBJS	Nilai Barang
Pemerintah Kota Pangkalpinang	Tanah	024/BAST/BAKEUDA/IV/2022 dan W.7.PAS.PAS.4.PB.05.03.935	2PKTQKYA	00235A	Rp 350.025.000
TOTAL					Rp 350.025.000

Adapun Rincian Tanah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terletak:

di Jl. Merdeka muntok, Jl.lcan saleh, Jl.sungai selan, Jl. Ahmad yani, Jl.Tua Tunu, Jl.Bukit Semut, Jl.Lintas Timur, Jl.Cerucuk Badau, Samping RRI Pemancar Kimak Sungailiat, dan Jl. Raya Linta Timur II Kelurahan Selindung Kota Pangkalpinang.

**Peralatan dan
Mesin**
Rp36.553.455.219

C.3. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp36.553.455.219** dan **Rp31.006.864.286**. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin	
Saldo Awal	31.006.864.286
Mutasi Tambah	5.994.759.446
Mutasi Kurang	448.168.513
Saldo Per 31 Desember 2021	36.553.455.219

Adapun mutasi tambah peralatan dan mesin senilai **Rp5.994.759.446** diperoleh dari pembelian, hibah, dan reklasifikasi masuk, dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS TRANSAKSI	NILAI RUPIAH
1	Pembelian	743.422.349
2	Hibah Masuk	73.600.000
3	Transfer Masuk	5.091.976.997
4	Reklasifikasi Masuk	85.760.100
Total Mutasi Tambah		5.994.759.446

Transaksi Hibah masuk peralatan dan mesin senilai **Rp73.600.000** terdapat pada satker Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang dengan rincian data hibah masuk sebagai berikut:

Pemberi Hibah	Jenis Barang	No. MOU/BAST	No. Register Hibah	No. MPHLEJS	Nilai Barang
PT. Anugrah Daksa Selaras	HPL Drop Meja, Kursi, Sound System, AC Split, Komputer, Printer	1203/CSR/MGM/ADS/2022 dan W7.PAS.PAS.4-UM03.05-4111	2WSFSJFA	00368A	Rp 73.600.000
TOTAL					Rp 73.600.000

**Gedung dan Bangunan
Rp80.127.821.791**

C.4. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah **Rp80.127.821.791** dan **Rp71.309.710.071**. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan	
Saldo Awal	Rp 71.309.710.071
Mutasi tambah:	Rp 8.866.306.720
Mutasi Kurang:	Rp 48.195.000
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 80.127.821.791

Adapun mutasi tambah Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan senilai **Rp8.866.306.720** terdiri dari pembangunan

Gedung Kantor Permanen Balai Pemasarakatan Tanjungpandan yang telah selesai dan dilakukan serah terima pada bulan Desember 2022 dengan nilai **Rp8.366.958.500**, serta penerimaan hibah berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang untuk Gedung Pelayanan Terpadu yang berlokasi di Jl. Pengayoman Lintas Timur II, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, senilai **Rp402.200.000**, dengan rincian data hibah sebagai berikut:

Pemberi Hibah	Jenis Barang	No. MOU/BAST	No. Register Hibah	No. MPHBJJS	Nilai Barang
PT. Anugrah Daksa Selaras	Gedung Pelayanan Terpadu	1203/CSR/MGWADS/2022 dan W7.PAS.PAS.4-UM.03.05-4111	2WSFSJFA	00368A	Rp 402.200.000
TOTAL					Rp 402.200.000

Aset Tetap Lainnya
Rp45.143.245

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sama yaitu sebesar **Rp45.143.245** karena tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Aset tetap lainnya tersebut berupa buku dan bahan kartografi.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp43.844.020.735

C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing **Rp43.844.020.735** dan **Rp37.717.121.125**.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan
1	Gedung dan Bangunan	Rp 80.127.821.791	Rp 17.885.117.228
2	Peralatan dan Mesin	Rp 36.553.455.219	Rp 25.958.903.507
Akumulasi Penyusutan		Rp 116.681.277.010	Rp 43.844.020.735

Aset Lain-Lain
Rp458.061.736

C.7. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp458.061.736** dan **Rp2.882.110.632**. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang sebagian besar telah dilakukan penghapusan dari BMN. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Lain-lain	
Saldo Awal	Rp 2.882.110.632
Mutasi tambah:	Rp 94.209.713
Mutasi Kurang:	Rp 2.518.258.609
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 458.061.736

Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya
Rp456.061.736

C.8. Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp456.061.736** dan **Rp1.396.278.748**. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2022

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
Aset Lain-lain	458.061.736	456.061.736
Jumlah	458.061.736	456.061.736

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp149.290.178

C.9. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp149.290.178** dan **Rp22.210.500**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu

kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2022 merupakan utang pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan/Tahanan TA 2022 pada Lembaga Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Utang BAMA TA 2022
1	406508	Lapas Kelas IIA Pangkalpinang	Rp 1.494.169
2	683682	Lapas Narkotika Pangkalpinang	Rp 16.561.244
3	518347	Lapas Kelas IIB Sungailiat	Rp 103.971.700
4	406514	Lapas Kelas IIB Tanjungpandan	Rp 25.325.138
5	406523	Rutan Kelas IIB Muntok	Rp 1.937.927
TOTAL UTANG BAMA TA 2022			Rp 149.290.178

*Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp616.784*

C.10. Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp616.784** dan **Rp2.228.706**. Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa Gedung dan bangunan untuk kantin pada Satker RUPBASAN Pangkalpinang dengan periode kontrak sampai dengan 31 Januari 2024.

*Ekuitas
Rp236.683.380.576*

C.11. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp236.683.380.576** dan **Rp228.908.656.447**. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

**Pendapatan
PNBP
Rp176.686.359**

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp176.686.359** dan **Rp140.475.116**. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	400.000	19.645.500
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	49.333.635	56.444.616
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	82.508.000	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	44.444.724	64.385.000
Jumlah	176.686.359	140.475.116

**Beban Pegawai
Rp30.460.622.985**

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp30.460.622.985** dan **Rp29.025.271.886**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
BEBAN PEGAWAI :			
Beban Gaji PNS	19.849.321.080	18.764.691.980	6
Beban Pembulatan Gaji	432.034	348.177	24
Beban Tunjangan-Tunjangan	5.379.099.248	5.127.724.545	5
Beban Uang Makan PNS	4.996.868.000	4.991.488.851	0
Beban Lembur	238.700.000	147.866.050	61
TOTAL BEBAN	30.464.420.362	29.032.119.603	5
PENGEMBALIAN :			
Pengembalian Gaji Pokok PNS	179.600	5.324.346	(97)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	7.493	8.371	(10)
Pengembalian Beban Tunjangan-Tunjangan	3.610.284	1.515.000	138
TOTAL PENGEMBALIAN	3.797.377	6.847.717	(45)
JUMLAH BEBAN (NETTO)	30.460.622.985	29.025.271.886	5

**Beban
Persediaan
Rp3.321.735.612**

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp3.321.735.612** dan **Rp2.670.695.401**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	3.321.735.612	2.669.873.481	24,42
Beban Persediaan Amunisi	0	821.920	(100,00)
Jumlah Beban Persediaan	3.321.735.612	2.670.695.401	24,38

**Beban Barang
dan Jasa
Rp27.233.945.473**

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp27.233.945.473** dan **Rp25.062.966.994**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	21.061.399.078	20.754.883.576	1,48
Beban Barang Non Operasional	4.619.524.933	2.902.444.897	59,16
Beban Langganan Daya dan Jasa	1.577.271.469	1.472.055.375	7,15
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	16.676.500	-100,00
TOTAL BEBAN	27.258.195.480	25.146.060.348	8,40
PENGEMBALIAN			
Pengembalian Beban Pengadaan BAMA	24.250.007	83.093.354	-70,82
TOTAL PENGEMBALIAN	24.250.007	83.093.354	-70,82
TOTAL BEBAN (NETTO)	27.233.945.473	25.062.966.994	8,66

**Beban
Pemeliharaan
Rp3.093.562.296**

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp3.093.562.296** dan **Rp2.872.222.749**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.866.275.480	1.998.781.115	-6,63
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	747.171.641	614.370.585	21,62
Beban Persediaan Bahan Pemeliharaan	480.115.175	259.071.049	85,32
Jumlah	3.093.562.296	2.872.222.749	7,71

**Beban
Perjalanan
Dinas
Rp2.412.884.123**

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp2.412.884.123** dan **Rp1.581.110.200**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.502.873.923	1.045.060.200	43,81
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	870.220.000	536.050.000	62,34
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	39.790.200	0	#DIV/0!
Jumlah	2.412.884.123	1.581.110.200	52,61

**Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp5.823.899.127**

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp5.823.899.127** dan **Rp5.336.349.892**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*)

selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.628.932.248	3.135.617.077	16
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.164.034.552	2.163.883.331	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	3.534.616	(100)
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang tdk digunakan	30.932.327	33.314.868	(7)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.823.899.127	5.336.349.892	9

*Surplus/ Defisit
dari Kegiatan
Non
Operasional
Rp(1.438.345.420)*

D.8. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

URAIAN	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	14.554.137	47.781.646	-70
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1.452.899.557	50.064.968	2802
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-1.438.345.420	2.283.322	-63094

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp228.908.656.447

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp228.908.656.447** dan **Rp231.600.372.724**.

Defisit LO
Rp73.608.308.677

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah defisit sebesar **Rp73.608.308.677** dan **Rp66.405.858.684**. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Rp(2.062.000)

E.3. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas aset tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp(2.062.000) dan Rp(2.848.802.591). Adapun koreksi tersebut merupakan koreksi dalam rangka Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2021. Satuan Kerja Pemasarakatan penerima transfer barang pengadaan *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor TA 2021 diwajibkan untuk melakukan penyesuaian harga satuan barang dengan mekanisme koreksi nilai (Menu Koreksi Susulan Berkurang) melalui Aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap.

Transaksi Antar Entitas
Rp81.385.094.806

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp81.385.094.806** dan **Rp68.783.756.493**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
Per 31 Desember 2022**

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	74.128.447.881
Transfer Masuk	7.187.852.583
Pengesahan Hibah Langsung	827.905.000
Diterima dari Entitas Lain	(189.628.574)
Transfer Keluar	(569.482.084)
TOTAL	81.385.094.806

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2022, terdapat DDEL sebesar **Rp(189.628.574)** dan DKEL sebesar **Rp74.128.447.881**.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp7.187.852.583** dan **Rp569.482.084**.

Pada Satker Balai Pemasyarakatan Pangkalpinang terdapat selisih Transfer Masuk / Transfer Keluar yang disebabkan karena adanya Transfer Masuk berupa Instalasi Penambahan Daya Listrik yang dicatat Transfer Keluar oleh Satker Pengirim yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan Balai Pemasyarakatan Pangkalpinang sebagai Satker Penerima mencatat Transfer Masuk sebagai Gedung dan Bangunan.

Adapun rincian transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar pada Satker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut:

Rincian Transaksi Transfer Masuk Per 31 Desember 2022

No	Kode Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Jenis Barang	Kode Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Nilai Transfer Masuk
1	409237	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Barang Konsumsi	352605	LPKA Kelas II Pangkalpinang	Rp 55.393.280
			Bahan Untuk Pemeliharaan			Rp 13.555.000
2	409237	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Barang Konsumsi	406508	Lapas Kelas IIA Pangkalpinang	Rp 144.189.561
			Bahan untuk Pemeliharaan			Rp 67.775.000
			Peralatan dan Mesin			Rp 112.933.793
3	409238	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Barang Konsumsi	406514	Lapas Kelas IIB Tanjungpandan	Rp 62.317.440
			Bahan untuk Pemeliharaan			Rp 67.775.000
			Peralatan dan Mesin			Rp 636.027.350
4	409238	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Barang Konsumsi	406523	RUTAN Kelas IIB Muntok	Rp 147.856.280
			Bahan untuk Pemeliharaan			Rp 13.555.000
			Peralatan dan Mesin			Rp 133.527.616
			Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			-Rp 18.613.078
5	409238	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Barang Konsumsi	418347	Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang	Rp 55.393.280
			Bahan untuk Pemeliharaan			Rp 67.775.000
			Peralatan dan Mesin			Rp 650.559.522
			Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			-Rp 18.613.078
6	409238	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Barang Konsumsi	568712	Lapas Kelas IIB Sungailiat	Rp 236.607.480
			Bahan untuk Pemeliharaan			Rp 67.775.000
			Peralatan dan Mesin			Rp 2.416.390.862
			Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			-Rp 390.916.367
7	409237	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Barang Konsumsi	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Rp 672.558.384
			Amunisi			Rp 88.500.000
			Peralatan dan Mesin			Rp 244.913.502
8	409237	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Aset Tetap Renovasi	653222	BAPAS Pangkalpinang	Rp 48.953.220
9	409237	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Barang Konsumsi	663090	RUPBASAN Pangkalpinang	Rp 13.848.320
10	409238	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Barang Konsumsi	683682	Lapas Narkotika Kelas II Pangkalpinang	Rp 329.070.480
			Bahan untuk Pemeliharaan			Rp 67.775.000
			Peralatan dan Mesin			Rp 631.487.652
11	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Barang Konsumsi	352605	LPKA Kelas II Pangkalpinang	Rp 66.992.296
			Peralatan dan Mesin			Rp 3.128.670
12	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Barang Konsumsi	406508	Lapas Kelas IIA Pangkalpinang	Rp 72.366.816
13	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Barang Konsumsi	406514	Lapas Kelas IIB Tanjungpandan	Rp 66.992.296
			Peralatan dan Mesin			Rp 15.643.350
14	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Barang Konsumsi	406523	RUTAN Kelas IIB Muntok	Rp 51.895.432
15	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Barang Konsumsi	418347	Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang	Rp 51.895.432
			Peralatan dan Mesin			Rp 12.514.680
16	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Barang Konsumsi	568712	Lapas Kelas IIB Sungailiat	Rp 72.366.816
17	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Barang Konsumsi	653222	BAPAS Pangkalpinang	Rp 25.022.832
18	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Barang Konsumsi	663090	RUPBASAN Pangkalpinang	Rp 25.022.832
19	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Barang Konsumsi	683682	Lapas Narkotika Kelas II Pangkalpinang	Rp 105.640.632
20	663090	RUPBASAN Pangkalpinang	Peralatan dan Mesin	406523	RUTAN Kelas IIB Muntok	Rp 234.850.000
			Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			-Rp 234.850.000
JUMLAH TRANSFER MASUK						Rp 7.187.852.583

Rincian Transaksi Transfer Keluar Per 31 Desember 2022

No	Kode Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Jenis Barang	Kode Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Nilai Transfer Keluar
1	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Barang Konsumsi	352605	LPKA Kelas II Pangkalpinang	Rp 66.992.296
			Peralatan dan Mesin			Rp 3.128.670
2	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Barang Konsumsi	406508	Lapas Kelas IIA Pangkalpinang	Rp 72.366.816
3	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Barang Konsumsi	406514	Lapas Kelas IIB Tanjungpandan	Rp 66.992.296
			Peralatan dan Mesin			Rp 15.643.350
4	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Barang Konsumsi	406523	RUTAN Kelas IIB Muntok	Rp 51.895.432
5	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Barang Konsumsi	418347	Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang	Rp 51.895.432
			Peralatan dan Mesin			Rp 12.514.680
6	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Barang Konsumsi	568712	Lapas Kelas IIB Sungailiat	Rp 72.366.816
7	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Barang Konsumsi	653222	BAPAS Pangkalpinang	Rp 25.022.832
8	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Barang Konsumsi	663090	RUPBASAN Pangkalpinang	Rp 25.022.832
9	649003	Kanwil Kemenkumham Babel (Divisi Pemasyarakatan)	Barang Konsumsi	683682	Lapas Narkotika Kelas II Pangkalpinang	Rp 105.640.632
10	663090	RUPBASAN Pangkalpinang	Peralatan dan Mesin	406523	RUTAN Kelas IIB Muntok	Rp 234.850.000
			Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			-Rp 234.850.000
JUMLAH TRANSFER MASUK						Rp 569.482.084

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung Barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp827.905.000**, yang diterima oleh Satker Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang berupa Tanah, Bangunan Gedung, dan Peralatan dan Mesin, dengan rincian sebagai berikut :

Bentuk Barang	No. MOU/BAST	No. Register	No. MPHLBS	Nilai Barang
Tanah	024/BAST/BAKEUDA/IV/2022 dan W.7.PAS.PAS.4.PB.05.03.935	2PKTQKYA	00235A	Rp 350.025.000
Gedung dan Bangunan	1203/CSR/MGMWADS/2022 dan	2WSFSJFA	00368A	Rp 402.200.000
Peralatan dan Mesin	W7.PAS.PAS.4-UM.03.05-4111			Rp 75.680.000
				Rp 827.905.000

Ekuitas Akhir
Rp236.683.380.576

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp236.683.380.576** dan **Rp228.908.656.447**.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak Terdapat Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.

Pangkalpinang, 2 Mei 2023
Kepala Kantor Wilayah



HARUN SULIANTO
NIP. 196504081987031002

**KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH
(UAPPA-W)
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode dan Nama UAKPA : (649003) Kanwil Kemenkumham Kep. Babel (Div. Pemasarakatan)
 Kode dan Nama UAPPAW : (3000) Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung
 Kode dan Nama Eselon I : (05) Direktorat Jenderal Pemasarakatan
 Kode dan Nama K/L : (013) Kementerian Hukum dan HAM RI

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2. Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	√		Ada
2. Neraca Percobaan AkruaI	√		Ada
3. Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MonSAKTI			
Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/ MonSAKTI	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/ MonSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Sama Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MonSAKTI			
To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Pagu Minus per tanggal pelaporan		√	Tidak
2. Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3. Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4. Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak

5.	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kade Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6.	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7.	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8.	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9.	Ketidaksesuaian Akun Vs Kade Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10.	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang	N/A	N/A	Tidak
11.	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12.	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah "TDK RUPIAH" Yang BEDA?		√	Tidak
2.	Adakah "TDK COA" Yang BEDA?		√	Tidak
3.	Adakah "TDK DETAIL" Yang BEDA?		√	Tidak
	i. Pagu / DIPA		√	Tidak
	ii. Estimasi PNBPN		√	Tidak
	iii. Belanja		√	Tidak
	iv. Pengembalian Belanja		√	Tidak
	v. Pendapatan		√	Tidak
	vi. Pengembalian Pendapatan		√	Tidak
	vii. Kas BLU		√	Tidak
	viii. Kas Di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	ix. Kas Hibah		√	Tidak
	x. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
Rekon Internal		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
Daftar MonSAKTI		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2.	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3.	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4.	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5.	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6.	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak

PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL			
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2. Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3. Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)		√	Ya
2. Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)		√	Ya
3. Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)		√	Ya
4. Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)		√	Ya
5. Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	N/A	N/A	Ya
6. Akun Belanja/Bahan (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)		√	Ya
7. Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)		√	Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2. Terdapat Akun 111 lxx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3. Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4. Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/ Subsidi/ Hibah/ Lain-lain		√	Tidak
5. Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/ berjaga-jaga"		√	Tidak
6. Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7. Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8. Terdapat akun 41XXXX /43XXXX (Pendapatan Perpajakan/Hibah)		√	Tidak
9. Terdapat akun 421xxx/ 422xxx/ 423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10. Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11. Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12. Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13. Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2. Terdapat akun 424XXXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3. Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak

4. Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	N/A	N/A	Ada/Tidak
Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	N/A	N/A	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2. Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya, kecuali Di RRI dan PO LRI		√	Tidak
Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	√		Ada/Tidak
1. Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A	N/A	Ya
4. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A	N/A	Ya
5. Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)?	N/A	N/A	Ya
Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	N/A	N/A	Ada/Tidak
1. Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	N/A	N/A	Ya
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MonSAKTI	0	0	
2. Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0	0	
3. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2. Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	N/A	N/A	Ya/Tidak

3. Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?	N/A	N/A	Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)	N/A	N/A	Ya/Tidak
Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah.		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA			
Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2. Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	N/A	N/A	Ya
4. Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	N/A	N/A	Ya
5. Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	N/A	N/A	Ya
6. Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7. Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8. Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2. Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3. Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4. Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5. Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/ penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6. Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7. Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1. "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2. Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3. Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4. Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
Contoh: Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/ Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)			
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2. Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3. Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4. Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5. Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6. Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak
7. Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ya/Tidak
- Penyisihan Piutang/ Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ya/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ya/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak

4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ya/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5. Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?	√		Ya/Tidak
Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
Pengecekan Behan Diserahkan Ke Masyarakat & Behan Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
2. Apakah ada Beban Bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
2. Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak
- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
3. Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
4. Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
5. Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121.XX) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU			
LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	N/A	N/A	Ya
2. Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	N/A	N/A	Tidak
3. Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A	N/A	Ya
4. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	N/A	N/A	Ya
5. Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A	N/A	Ya
6. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU?	N/A	N/A	Ya
LAK BLU			
1. Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	N/A	N/A	Ya
2. Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A	N/A	Ya
3. Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A	N/A	Ya

4.	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	N/A	N/A	Ya
5.	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
6.	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
7.	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	N/A	N/A	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

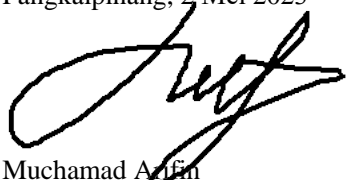
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MonSAKTI"

--	--	--	--

Mengetahui
 Pejabat Penyusun LKKL

 Edi Kurniawan
 NIP 198709082009121006

Pangkalpinang, 2 Mei 2023


 Muchamad Arifin
 NIP 199111112019011001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER 1 JANUARI 2022 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

WILAYAH/PROVINSI :

BA(013) ES1(05) BANGKA BELITUNG

Tgl. Cetak 02/05/2023

lap_neraca_percobaan_sawal_akrua_uappaw --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	913,120,757	0
0.0	117112	Amunisi	361,926,535	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	19,725,000	0
0.0	131111	Tanah	161,507,895,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	31,006,864,286	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	71,309,710,071	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	45,143,245	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	21,996,038,449
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	15,721,082,676
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	2,882,110,632	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,396,278,748
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	22,210,500
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	2,228,706
0.0	391111	Ekuitas	0	228,908,656,447
JUMLAH			268,046,495,526	268,046,495,526

NERACA
TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPW : (013053000KD) BA(013) ES1(05) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 02/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 02/05/23 8:17 AM

Halaman : 1

lap_neraca_uappaw_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	2,090,968,018	1,294,772,292	796,195,726	61.49
JUMLAH ASET LANCAR	2,090,968,018	1,294,772,292	796,195,726	61.49
ASET TETAP				
Tanah	161,857,920,000	161,507,895,000	350,025,000	0.22
Peralatan dan Mesin	36,553,455,219	31,006,864,286	5,546,590,933	17.89
Gedung dan Bangunan	80,127,821,791	71,309,710,071	8,818,111,720	12.37
Aset Tetap Lainnya	45,143,245	45,143,245	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(43,844,020,735)	(37,717,121,125)	(6,126,899,610)	16.24
JUMLAH ASET TETAP	234,740,319,520	226,152,491,477	8,587,828,043	3.80
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	458,061,736	2,882,110,632	(2,424,048,896)	(84.11)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(456,061,736)	(1,396,278,748)	940,217,012	(67.34)
JUMLAH ASET LAINNYA	2,000,000	1,485,831,884	(1,483,831,884)	(99.87)
JUMLAH ASET	236,833,287,538	228,933,095,653	7,900,191,885	3.45
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	149,290,178	22,210,500	127,079,678	572.16
Pendapatan Diterima Dimuka	616,784	2,228,706	(1,611,922)	(72.33)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	149,906,962	24,439,206	125,467,756	513.39
JUMLAH KEWAJIBAN	149,906,962	24,439,206	125,467,756	513.39
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	236,683,380,576	228,908,656,447	7,774,724,129	3.40
JUMLAH EKUITAS	236,683,380,576	228,908,656,447	7,774,724,129	3.40
JUMLAH EKUITAS	236,683,380,576	228,908,656,447	7,774,724,129	3.40
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	236,833,287,538	228,933,095,653	7,900,191,885	3.45

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (013053000KD) BA(013) ES1(05) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 02/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 02/05/23 8:17 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,423,601,483	0
0.0	117112	Amunisi	450,426,535	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	216,940,000	0
0.0	131111	Tanah	161,857,920,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	36,553,455,219	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	80,127,821,791	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	45,143,245	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	25,958,903,507
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	17,885,117,228
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	458,061,736	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	456,061,736
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	149,290,178
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	616,784
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	74,128,447,881
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	189,628,574	0
0.0	313211	Transfer Keluar	569,482,084	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	7,187,852,583
0.0	391111	Ekuitas	0	228,908,656,447
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2,062,000	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	827,905,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	14,554,137
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	49,333,635
3.0	425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	82,908,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	44,444,724
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	19,849,141,480	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	424,541	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,354,741,056	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	399,302,241	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	499,620,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,671,220,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	4,873,487	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,367,217,180	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	4,996,868,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	78,515,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	238,700,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,203,576,372	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	18,296,472,075	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	423,110,924	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (013053000KD) BA(013) ES1(05) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 02/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 02/05/23 8:17 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,875,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	828,620,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	279,494,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,847,849,229	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	24,910,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,652,306,704	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	6,300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	88,159,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,036,714,119	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	38,394,564	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	62,502,286	0
3.0	522141	Beban Sewa	67,200,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	330,362,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	40,628,500	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,470,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,866,275,480	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	747,171,641	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,502,873,923	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	870,220,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	39,790,200	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,628,932,248	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,164,034,552	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	30,932,327	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,321,735,612	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	480,115,175	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	1,452,899,557	0
JUMLAH			355,694,091,840	355,694,091,840

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (013053000KD) BA(013) ES1(05) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 02/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 02/05/23 8:17 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	74,128,447,881
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	189,628,574	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	14,554,137
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	47,721,713
3.0	425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	82,908,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	44,444,724
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	19,849,321,080	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	432,034	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,355,319,316	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	399,309,425	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	499,620,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,671,220,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,873,487	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,367,362,020	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	4,996,868,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	81,395,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	238,700,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,203,576,372	0
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	18,193,642,404	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	423,110,924	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,875,700	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	828,620,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	279,494,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	2,847,849,229	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	24,910,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,654,306,704	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	6,300,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	86,079,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,051,202,768	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	263,589,090	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,036,714,119	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	38,394,564	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	62,502,286	0
3.0	522141	Belanja Sewa	67,200,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	330,362,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	40,628,500	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,470,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,866,275,480	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (013053000KD) BA(013) ES1(05) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 02/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 02/05/23 8:17 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	111,535,150	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	747,171,641	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,500,873,923	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	870,220,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	39,790,200	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	743,422,349	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8,366,958,500	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	179,600
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	7,493
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	578,260
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	7,184
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	144,840
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	2,880,000
3.1	521112	Pengembalian Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	24,250,007
JUMLAH			74,346,123,839	74,346,123,839

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : (013053000KD) BA(013) ES1(05) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 02/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 02/05/23 8:16 AM

Halaman : 1

lap_lo_uappaw

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	176,686,359	140,475,116	36,211,243	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	176,686,359	140,475,116	36,211,243	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	176,686,359	140,475,116	36,211,243	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	30,460,622,985	29,025,271,886	1,435,351,099	-
Beban Persediaan	3,321,735,612	2,670,695,401	651,040,211	-
Beban Barang dan Jasa	27,233,945,473	25,062,966,994	2,170,978,479	-
Beban Pemeliharaan	3,093,562,296	2,872,222,749	221,339,547	-
Beban Perjalanan Dinas	2,412,884,123	1,581,110,200	831,773,923	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : (013053000KD) BA(013) ES1(05) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 02/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 02/05/23 8:16 AM

Halaman : 2

lap_lo_uappaw

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5,823,899,127	5,336,349,892	487,549,235	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	72,346,649,616	66,548,617,122	5,798,032,494	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(72,169,963,257)	(66,408,142,006)	(5,761,821,251)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(1,438,345,420)	(47,781,646)	(1,390,563,774)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	14,554,137	0	14,554,137	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1,452,899,557	47,781,646	1,405,117,911	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	50,064,968	(50,064,968)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	50,064,968	(50,064,968)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(1,438,345,420)	2,283,322	(1,440,628,742)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(73,608,308,677)	(66,405,858,684)	(7,202,449,993)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(73,608,308,677)	(66,405,858,684)	(7,202,449,993)	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (013053000KD) BA(013) ES1(05) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 02/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 02/05/23 8:16 AM

Halaman : 1

lap_lpe_uappaw

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	228,908,656,447	231,600,372,724	(2,691,716,277)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(73,608,308,677)	(66,405,858,684)	(7,202,449,993)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(2,062,000)	(5,069,614,086)	5,067,552,086	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	41,189,355	(41,189,355)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(2,263,703,269)	2,263,703,269	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(2,062,000)	(2,848,802,591)	2,846,740,591	-
LAIN-LAIN	0	1,702,419	(1,702,419)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	81,385,094,806	68,783,756,493	12,601,338,313	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	7,774,724,129	(2,691,716,277)	10,466,440,406	-
EKUITAS AKHIR	236,683,380,576	228,908,656,447	7,774,724,129	-

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013

UAPPAW : BA(013) ES1(05) BANGKA BELITUNG 013053000KD

Tgl Data : 02/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 02/05/23 8:16 AM

Halaman : 2

lap_ira_face_uappaw_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	74,934,686,000	74,128,447,881	(806,238,119)	99	61,649,909,000	60,857,390,116	(792,518,884)	99
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 05 **DITJEN PEMASYARAKATAN**
WILAYAH/PROVINSI : 013053000KD **BA(013) ES1(05) BANGKA BELITUNG**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 02/05/23 8:17 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_uappaw --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	18,600,000	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	18,600,000	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	291,325,000	277,186,000	263,589,090	0	263,589,090	95.09	13,596,910
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	291,325,000	277,186,000	263,589,090	0	263,589,090	95.09	13,596,910
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	65,064,000	3,876,000	1,470,000	0	1,470,000	37.93	2,406,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	65,064,000	3,876,000	1,470,000	0	1,470,000	37.93	2,406,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	374,989,000	287,362,000	271,359,090	0	271,359,090	94.43	16002910
	JUMLAH BELANJA	374,989,000	287,362,000	271,359,090	0	271,359,090	94.43	16,002,910

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 05 **DITJEN PEMASYARAKATAN**
WILAYAH/PROVINSI : 013053000KD **BA(013) ES1(05) BANGKA BELITUNG**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 02/05/23 8:17 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	16,265,300,000	19,852,444,000	19,849,321,080	179,600	19,849,141,480	99.98	3,302,520
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	405,000	567,000	432,034	7,493	424,541	74.87	142,459
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,723,400,000	1,356,466,000	1,355,319,316	578,260	1,354,741,056	99.87	1,724,944
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	340,375,000	400,514,000	399,309,425	7,184	399,302,241	99.7	1,211,759
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	455,840,000	500,133,000	499,620,000	0	499,620,000	99.9	513,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,598,130,000	1,672,228,000	1,671,220,000	0	1,671,220,000	99.94	1,008,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7,967,000	6,686,000	4,873,487	0	4,873,487	72.89	1,812,513
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,227,283,000	1,367,951,000	1,367,362,020	144,840	1,367,217,180	99.95	733,820
511129	Belanja Uang Makan PNS	5,533,989,000	5,016,339,000	4,996,868,000	0	4,996,868,000	99.61	19,471,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	32,520,000	81,539,000	81,395,000	2,880,000	78,515,000	96.29	3,024,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	27,185,209,000	30,254,867,000	30,225,720,362	3,797,377	30,221,922,985	99.9	32,944,015
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	123,603,000	239,585,000	238,700,000	0	238,700,000	99.63	885,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	123,603,000	239,585,000	238,700,000	0	238,700,000	99.63	885,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	27,308,812,000	30,494,452,000	30,464,420,362	3,797,377	30,460,622,985	99.9	33829015
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	997,512,000	1,209,623,000	1,203,576,372	0	1,203,576,372	99.5	6,046,628
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	19,193,160,000	18,294,331,000	18,193,642,404	24,250,007	18,169,392,397	99.32	124,938,603
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	377,940,000	424,831,000	423,110,924	0	423,110,924	99.6	1,720,076
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	22,640,000	7,274,000	5,875,700	0	5,875,700	80.78	1,398,300
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	746,160,000	828,625,000	828,620,000	0	828,620,000	100	5,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	281,600,000	279,650,000	279,494,000	0	279,494,000	99.94	156,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	21,619,012,000	21,044,334,000	20,934,319,400	24,250,007	20,910,069,393	99.48	134,264,607
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	3,570,695,000	3,007,299,000	2,847,849,229	0	2,847,849,229	94.7	159,449,771
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	65,020,000	28,330,000	24,910,000	0	24,910,000	87.93	3,420,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,776,584,000	1,694,933,000	1,654,306,704	0	1,654,306,704	97.6	40,626,296
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	18,600,000	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000	100	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 05 **DITJEN PEMASYARAKATAN**
WILAYAH/PROVINSI : 013053000KD **BA(013) ES1(05) BANGKA BELITUNG**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 02/05/23 8:17 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	86,584,000	86,079,000	0	86,079,000	99.42	505,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	5,430,899,000	4,823,446,000	4,619,444,933	0	4,619,444,933	95.77	204,001,067
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,059,148,000	2,078,746,000	2,051,202,768	0	2,051,202,768	98.68	27,543,232
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	291,325,000	277,186,000	263,589,090	0	263,589,090	95.09	13,596,910
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,350,473,000	2,355,932,000	2,314,791,858	0	2,314,791,858	98.25	41,140,142
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,196,400,000	1,044,710,000	1,036,714,119	0	1,036,714,119	99.23	7,995,881
522112	Belanja Langganan Telepon	47,820,000	39,750,000	38,394,564	0	38,394,564	96.59	1,355,436
522113	Belanja Langganan Air	51,600,000	66,620,000	62,502,286	0	62,502,286	93.82	4,117,714
522141	Belanja Sewa	70,000,000	67,200,000	67,200,000	0	67,200,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	551,070,000	365,892,000	330,362,000	0	330,362,000	90.29	35,530,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	102,000,000	42,320,000	40,628,500	0	40,628,500	96	1,691,500
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	65,064,000	3,876,000	1,470,000	0	1,470,000	37.93	2,406,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,083,954,000	1,630,368,000	1,577,271,469	0	1,577,271,469	96.74	53,096,531
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,080,668,000	1,866,478,000	1,866,275,480	0	1,866,275,480	99.99	202,520
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	112,238,000	111,568,000	111,535,150	0	111,535,150	99.97	32,850
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	678,582,000	772,872,000	747,171,641	0	747,171,641	96.67	25,700,359
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,871,488,000	2,750,918,000	2,724,982,271	0	2,724,982,271	99.06	25,935,729
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,682,617,000	1,533,829,000	1,500,873,923	0	1,500,873,923	97.85	32,955,077
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,711,550,000	1,134,595,000	870,220,000	0	870,220,000	76.7	264,375,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35,840,000	39,792,000	39,790,200	0	39,790,200	100	1,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,430,007,000	2,708,216,000	2,410,884,123	0	2,410,884,123	89.02	297,331,877
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	37,785,833,000	35,313,214,000	34,581,694,054	24,250,007	34,557,444,047	97.93	755769953
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	950,000,000	752,020,000	743,422,349	0	743,422,349	98.86	8,597,651
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	950,000,000	752,020,000	743,422,349	0	743,422,349	98.86	8,597,651

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 05 **DITJEN PEMASYARAKATAN**
WILAYAH/PROVINSI : 013053000KD **BA(013) ES1(05) BANGKA BELITUNG**

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 02/05/23 8:17 AM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8,375,000,000	8,375,000,000	8,366,958,500	0	8,366,958,500	99.9	8,041,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	8,375,000,000	8,375,000,000	8,366,958,500	0	8,366,958,500	99.9	8,041,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	9,325,000,000	9,127,020,000	9,110,380,849	0	9,110,380,849	99.82	16639151
	JUMLAH BELANJA	74,419,645,000	74,934,686,000	74,156,495,265	28,047,384	74,128,447,881	98.96	806,238,119

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.W.1

WILAYAH/PROVINSI : 013053000KD

BA(013) ES1(05) BANGKA BELITUNG

Tanggal : 02/05/23 8:17 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pond_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	14,554,137	0	14,554,137	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19,248,000	47,721,713	0	47,721,713	247.93
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	19,248,000	62,275,850	0	62,275,850	323.54
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	82,908,000	0	82,908,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	0	82,908,000	0	82,908,000	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	44,444,724	0	44,444,724	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	44,444,724	0	44,444,724	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	19,248,000	189,628,574	0	189,628,574	985.19
	JUMLAH PENDAPATAN	19,248,000	189,628,574	0	189,628,574	985.19